

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

REVIU



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI BANJARBARU
2023

KATA PENGANTAR

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dari rangkaian tersebut, perencanaan memegang peran penting bagi keberhasilan organisasi. Sebagai upaya meraih perencanaan yang matang, maka perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), mengakses lingkungan internal dan eksternal serta mengatur aktivitas-aktivitas, proses utama, dan sumber daya untuk mendukung tujuan yang terkait dengan *outcomes*.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2023. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya rencana kinerja ini, diharapkan semua yang terlibat mulai dari pejabat struktural, fungsional dan staf pelaksana mempunyai persepsi yang sama dalam mengemban tugas sesuai dengan *job* deskripsi masing-masing.

Banjarbaru, November 2023

KEPALA BSPJI BANJARBARU,



MARZUKI MARNALA SINAMBELA

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	5
A. Hasil-hasil Pembangunan	5
B. Arah Pembangunan.....	8
BAB III RENCANA KINERJA	15
A. Sasaran Strategis	15
B. Indikator Kinerja	16
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN Rencana Kinerja 2023.....	25

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan Peningkatan Kapabilitas Hasil Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri 2020-2022	5
Tabel 1.2 Peningkatan Peran Balai Dalam Pengembangan Industri dari TA 2018-2022	5
Tabel 1.3 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri TA 2018-2022.....	5
Tabel 1.4 Capaian Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 1.5 Capaian Nilai Disiplin Pegawai Tahun 2018-2022.....	6
Tabel 1.6 Capaian Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018-2022.....	6
Tabel 1.7 Capaian Nilai Minimal Laporan Keuangan Tahun 2018-2021	6
Tabel 1.8 Tabel Penerimaan PNBPD Berdasarkan Jenis PJT 2018-2022	6
Tabel 1.9 Tabel Jumlah Pelanggan dari TA 2018-2022.....	7
Tabel 1.10 Tabel Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultansi TA 2018-2022.....	7
Tabel 1.11 Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2018-2022	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan pembangunan nasional pada sektor industri berkembang mengikuti tuntutan salah satu misi/program aksi presiden yaitu melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Perubahan ini memerlukan sikap arif dalam menghadapinya, sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri khususnya di Kalimantan Selatan sebagai daerah dimana BSPJI Banjarbaru berdomisili dan Kalimantan Tengah. Dalam menghadapi dinamika perubahan ini BSPJI Banjarbaru harus mampu menciptakan nilai atau produk yang ada manfaatnya dan berorientasi pada *outcomes* bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang berpengaruh bagi organisasi baik pengaruh internal maupun eksternal. Untuk mengantisipasinya diperlukan suatu perencanaan jangka menengah sebagai dasar pelaksanaan kinerja jangka pendek.

BSPJI Banjarbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, juga telah menetapkan sasaran dan program organisasi jangka menengah sesuai dengan tupoksinya yang mendukung tujuan BSKJI yaitu meningkatkannya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas. Sebagai penjabaran lebih lanjut, untuk perencanaan tahun anggaran 2024 yang merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan, diperlukan juga adanya Rencana Kinerja (Renkin) satuan kerja atau unit kerja. Bersamaan dengan ditetapkannya sasaran dan program tersebut, maka perlu pula ditetapkan sasaran dan kegiatan 1 (satu) tahun untuk mencapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem administrasi pemerintahan maupun peraturan perundangan yang berlaku akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi riil serta tuntutan perkembangan dunia sehingga substansi dari Rencana Kinerja perlu diperbaharui dan disesuaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA pada setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja BSPJI Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan (2024), indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
- Memberi informasi tentang bagaimana cara mencapai sasaran tersebut dalam bentuk program dan kegiatan serta penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan kebijakan dengan programnya
- Memberi kesempatan kepada masyarakat luas, perusahaan industri, dan badan usaha untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses pencapaian sasaran
- Memberi informasi dan kesempatan kepada masyarakat luas, perusahaan industri dan badan usaha agar memanfaatkan paket jasa layanan teknis BSPJI Banjarbaru.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

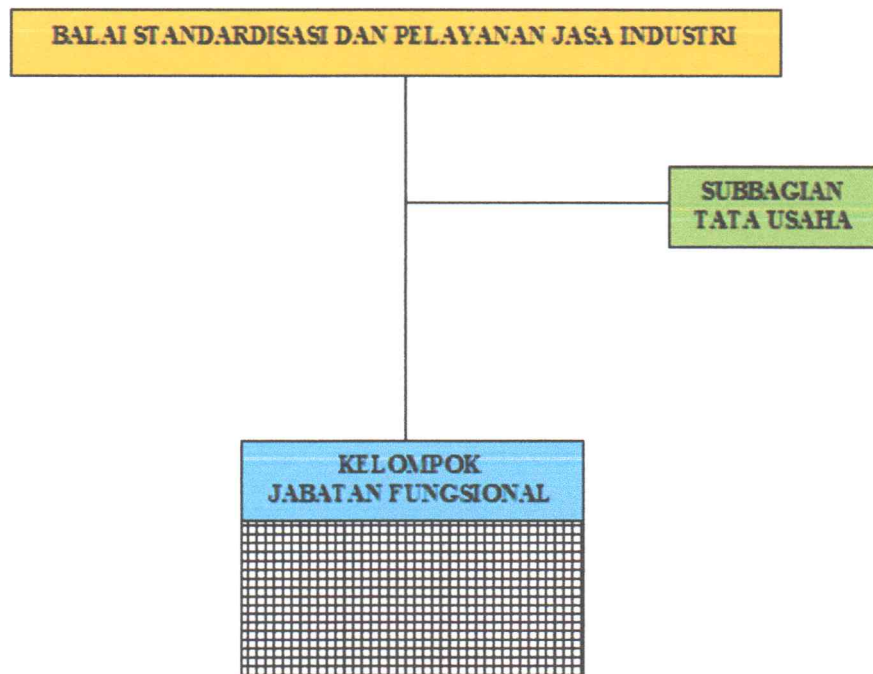
Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah *melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.*

Sedangkan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut diatas adalah :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;

- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. STRUKTUR ORGANISASI



E. RUANG LINGKUP

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri merupakan program yang menjadi landasan untuk menjalankan perubahan tupoksi BSPJI Banjarbaru karena dengan program ini BSPJI Banjarbaru dapat menjalankan kegiatannya yaitu **standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah** guna memenuhi kebutuhan masyarakat industri serta mendukung Kementerian Perindustrian untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

Dalam penyusunan Renkin BSPJI Banjarbaru tahun 2023 ini, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi oleh Rencana Sasaran Strategis 2021-2024 BSPJI Banjarbaru (Reviu 2023).

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

Adapun program yang telah dilaksanakan BSPJI Banjarbaru adalah Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang dilaksanakan melalui kegiatan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam Renstra BSPJI Banjarbaru juga telah ditetapkan sasaran-sasaran kegiatan beserta indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran kegiatan. Hasil dari penetapan sasaran-sasaran kegiatan beserta IKU dan IKSS adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri 2020-2022

Indikator Kinerja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi

Tabel 1.2
Peningkatan Peran Balai Dalam Pengembangan Industri dari TA 2018-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1	2

Tabel 1.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri TA 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,84	3,84	3,70	3,60	3,62

Tabel 1.4
Capaian Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	-	-	74	79	83,73

Tabel 1.5
Capaian Nilai Disiplin Pegawai Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Nilai Disiplin Pegawai	89,18	88,57	90,13	96,17	96,34

Tabel 1.6
Capaian Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021	Capaian TA. 2022
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	81,14 (A)	78,66 (BB)	82,21 (A)	85,08 (A)	83,15 (A)

Tabel 1.7
Capaian Nilai Minimal Laporan Keuangan Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian LK TA. 2018	Capaian LK TA. 2019	Capaian LK TA. 2020	Capaian LK TA. 2021
Nilai Minimal Laporan Keuangan	92,0	95,5	87,03	94,40

Pencapaian terkait **Layanan Jasa Teknis dan Penerimaan PNBP** selama kurun waktu 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT dari TA 2018-2022

No	Jenis JPT	PNBP/BLU (Rp. 000)					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Riset	0	Rp 26,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26,500,000
2	Pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	Rp 46,000,000	Rp 108,000,000	Rp 35,900,000	Rp 24,800,000	Rp 74,400,000	Rp 289,100,000
3	Pengujian	Rp 2,737,630,000	Rp 2,942,167,500	Rp 2,934,225,000	Rp 4,205,636,000	Rp 4,445,802,250	Rp 17,265,460,750
4	Konsultansi	0	Rp -	Rp 35,000,000	Rp -	Rp 42,000,000	Rp 77,000,000
5	Standardisasi	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Kalibrasi	0	Rp -	Rp -	Rp 2,000,000	Rp 1,108,000	Rp 3,108,000
7	Sertifikasi	Rp 112,500,000	Rp 90,000,000	Rp 98,500,000	Rp 112,200,000	Rp 212,087,500	Rp 625,287,500
8	RBPI	0	Rp -	Rp 12,000,000	Rp -	Rp -	Rp 12,000,000
9	Lainnya	0	Rp 500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500,000
	Total	Rp 2,896,130,000	Rp 3,167,167,500	Rp 3,115,625,000	Rp 4,344,636,000	Rp 4,775,397,750	Rp 18,298,956,250

Realisasi PNBP Semua Layanan Jasa selama 5 tahun sebesar Rp18.298.956.250,- dan paling banyak dihasilkan dari jenis JPT Pengujian Rp17.265.460.750,-. Hal ini sejalan dengan tupoksi BSPJI Banjarbaru dimana salah satunya kegiatan utamanya adalah Layanan Jasa Pengujian.

Tabel 1.9
Tabel Jumlah Pelanggan dari TA 2018-2022

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
1	Litbang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	7	3	32	24	241	158	301	266	24	10
3	Pengujian	214	133	252	168	215	196	219	219	214	232
4	Kalibrasi	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2
5	Konsultansi	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
6	Sertifikasi	111	0	16	0	16	0	20	0	25	0
7	RBPI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

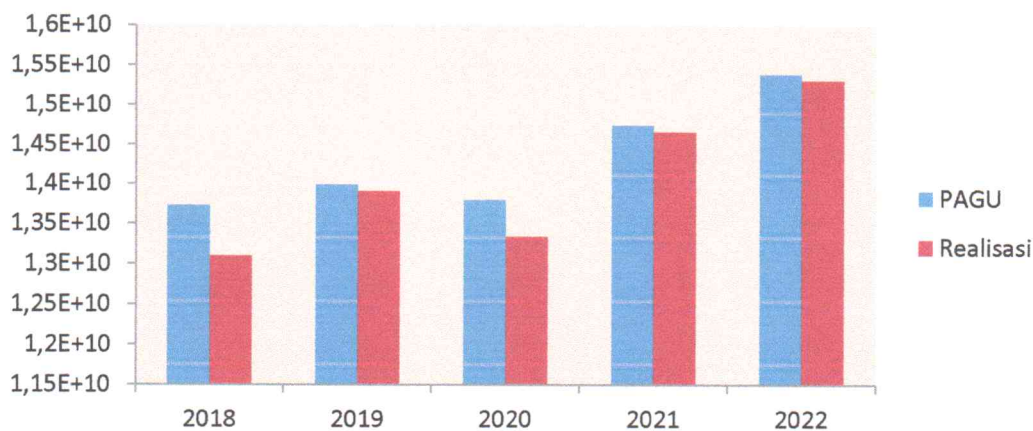
Tabel 1.10
Tabel Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Riset/ Konsultansi TA 2018-2022

No.	Jenis JPT	Jumlah Smpel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Konsultasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Litbang (Jumlah Litbang PNPB)	0	1	0	0	0
2	RBPI/Rancang Bangun Perekayasaan Industri (Jumlah RBPI)	0	0	1	0	0
3	Pelatihan/ Bimbingan Teknis					
	a)Jumlah Pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	2	5	7	11	7
	b) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/ Bimbingan Teknis (2022)	10	56	399	567	34
4	Pengujian					
	a) Jumlah Pelanggan	347	420	411	438	446
	b) Jumlah Sampel Uji	6847	7843	6792	6269	6380
5	Konsultansi/Supervisi (Jumlah Konsultansi/ Supervisi)	0	0	1	1	3
6	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)					
	a) Jumlah pelanggan	0	0	1	1	2
	b) Jumlah alat	0	0	1	4	7
7	Sertifikasi					
	a) Jumlah pelanggan	9	6	16	20	25
	b) Jumlah Sertifikat	6	5	16	19	20

Pencapaian kegiatan selama kurun waktu 2018-2022, didukung oleh pagu anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.11
Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2018-2022

Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2018 - 2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
PAGU	Rp13,727,360,000	Rp13,992,240,000	Rp13,791,929,000	Rp14,742,333,000	Rp15,382,687,000
Realisasi	Rp13,099,876,166	Rp13,902,686,980	Rp13,334,781,689	Rp14,654,984,345	Rp15,300,838,329
% Realisasi	95.43	99.36	96.69	99.41	99.47



Dalam menunjang tercapainya sasaran dan indikator kinerja selama ini maka pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Program Kegiatan Balai yang setiap tahunnya ditetapkan dalam RKAKL BSPJI Banjarbaru. Program kegiatan tersebut didukung oleh anggaran Swadana/Swakelola, mengikat, maupun tidak mengikat.

B. ARAH PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir.

Pengembangan Industri Nasional pada tahap ini menentukan 10 (sepuluh) industri prioritas, yaitu :

1. Industri Pangan (makanan dan minuman)
2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu :

1. Industri makanan dan minuman;
2. Industri tekstil dan busana;
3. Industri otomotif;
4. Industri kimia; dan
5. Industri elektronika

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2021-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu :

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
3. Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas sebagai berikut.

1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri,

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional.

5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan

pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

6. Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1). Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2). Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan

budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

BAB III RENCANA KINERJA

A. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai dalam periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Renstra 2021-2024 antara lain :

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni :

Sasaran kegiatan kesatu (SK1) : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

b. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni :

1. Sasaran kegiatan kedua (SK2) : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
2. Sasaran kegiatan ketiga (SK3) : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.

c. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Banjarbaru, yaitu:

1. Sasaran kegiatan keempat (SK4) : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
2. Sasaran kegiatan kelima (SK5) : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

d. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk

menghasilkan *output* dan *outcome* BSPJI Banjarbaru. Terdapat 3 (tiga) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yakni :

1. Sasaran kegiatan keenam (SK6) : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
2. Sasaran kegiatan ketujuh (SK7) : Penguatan Layanan Publik
3. Sasaran kegiatan kedelapan (SK8) : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

B. INDIKATOR KINERJA

Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan pada setiap sasaran, maka pada masing-masing indikator kinerja yang terkait terdapat cara perhitungan dan data dukung penunjang capaian serta kegiatan pendukungnya. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni :

Sasaran kegiatan kesatu (SK1) : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.

Indikator ini dihapus pada saat Reviu Renstra tahun 2022, sehingga tidak diberlakukan lagi pada Perjanjian Kinerja TA 2023.

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 35 Persen

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Beberapa tahapan rencana kerja dalam kegiatan ini antara lain :

- Identifikasi perencanaan kegiatan
- Pendataan industri sebagai mitra kegiatan
- Penyiapan dokumen kegiatan penguatan industri melalui optimalisasi teknologi

- Pelaksanaan kegiatan penguatan industri, kolaborasi, dan peningkatan peran balai melalui optimalisasi teknologi
- Pelaporan kegiatan

Selain itu, BSPJI Banjarbaru telah memiliki layanan baru khusus untuk IKM yaitu SAHABAT IKM dan juga ada program baru dari BSKJI yaitu PINOTI.

b. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni :

1. Sasaran kegiatan kedua (SK2) : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri.

Indikator ini dihapus pada saat Reviu Renstra tahun 2023, sehingga tidak diberlakukan lagi pada Perjanjian Kinerja TA 2023

- Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 2 perusahaan.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri , namun pada tahapan kegiatan lebih difokuskan dalam mendukung 4.0.

2. Sasaran kegiatan ketiga (SK3) : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 45 persen;
- Meningkatnya PNBP layanan jasa industri, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 7,0 persen;

- Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,75 Persen;
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2023 ditargetkan 85 persen.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

a) DAPATI

Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian melalui BSKJI untuk membantu meningkatkan kemampuan IKM dalam pengembangan dan penerapan teknologi industri.

b) Layanan Pengujian

Ruang lingkup parameter pengujian terakreditasi bidang kimia/fisika/biologi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-543-IDN, terdiri dari 12 komoditi, yaitu: pupuk NPK, pupuk fosfat alam, pupuk KCl, AMDK, garam konsumsi beriodium, air permukaan, air limbah, udara ambien, emisi tidak bergerak, kebisingan, dan lingkungan kerja, dengan 99 parameter uji per tahun 2022.

c) Pengelolaan Limbah

d) Layanan Sertifikasi

Sertifikasi ini rencananya tidak hanya terkait Produk dan Halal, namun juga Industri Hijau, SMM, dan Verifikasi TKDN. Ruang lingkup proses sertifikasi pada LSPro BSPJI Banjarbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) antara lain air mineral, air demineral, air minum embun, garam konsumsi beriodium, dan minyak goreng.

e) Jasa Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri

BSPJI Banjarbaru sebagai Unit Pelayanan Teknis juga memberikan pelatihan bagi SDM Industri seperti Training Pengambilan Sampel Air Limbah, Pelatihan Mikrobiologi untuk Industri AMDK, Pelatihan Audit

Internal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, Pelatihan Pemahaman SMM ISO 17025:2017.

- f) Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian.

Selain itu, Laboratorium BSPJI Banjarbaru juga telah teregister Permen LH No.23 Tahun 2020 Laboratorium Lingkungan. Ruang Lingkup Laboratorium Lingkungan adalah sesuai dengan lampiran sertifikat akreditasi laboratorium uji parameter air dan udara sesuai ISO/IEC 17025:2017 yang dikeluarkan oleh KAN.

- g) Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi

- h) Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001 dan SMM ISO 37001

- i) Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi dan Halal

Lembaga Pemeriksa Halal, yang terakreditasi pada TA 2022 dengan masa berlaku sertifikat tanggal 5 Oktober 2022 – 5 Oktober 2026. Jumlah Auditor Halal yang teregister oleh BPJPH per tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 3 (Tiga) orang.

- j) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peningkatan pelayanan dapat dilakukan jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, setiap tahunnya terus dilakukan perbaikan dan penambahan sarana sesuai kebutuhan melalui pengadaan peralatan dan bangunan. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

- k) Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium

- l) Pengadaan Alat Perkantoran

- m) Renovasi Gedung Tidak Bertingkat

c. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Banjarbaru, yaitu:

1. Sasaran kegiatan keempat (SK4) : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95,0 persen.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan Zona Integritas dan SPIP

b) Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja

Secara berkala BSPJI Banjarbaru melaksanakan pemantauan berupa monev bulanan untuk melakukan evaluasi dari realisasi atas perencanaan yang telah dibuat, dan setiap akhir tahun akan dilakukan monev tahunan dan juga Rapat Tinjauan Manajemen.

2. Sasaran kegiatan kelima (SK5) : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,60.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri

Media-media yang digunakan untuk mempromosikan dan memperkenalkan kemampuan balai kepada masyarakat luas dan perusahaan industri/ badan usaha / instansi lain. Media ini pun harapannya juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga kemudahan dalam pengaksesannya juga diperhatikan. Diharapkan menjadi salah satu kegiatan dimana pihak perwakilan balai dan pelanggan berada dalam satu kuorum yang sama dan bertatap muka secara langsung membahas segala yang terkait dengan pelayanan balai dan upaya peningkatannya.

Selain itu, demi memenuhi kepuasan masyarakat maka dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta kenyamanan dalam satu Gedung layanan terpadu yaitu *Banua Industrial Centre* (BIC). BIC mengintegrasikan semua layanan jasa seperti layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan pendampingan industri (bimbingan teknis).

b) Pengembangan Sistem Informasi

BSPJI Banjarbaru memiliki dan terus melakukan pengembangan sistem informasi yang diberi nama “SIBIRU” dimana sistem ini juga direncanakan untuk terintegrasi dengan SIP (Sistem Informasi Perkantoran) yang diperuntukkan untuk kegiatan internal BSPJI Banjarbaru.

c) Penerbitan Majalah/Jurnal

d. **Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)**

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BSPJI Banjarbaru. Terdapat 3 (tiga) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yakni :

1. Sasaran kegiatan keenam (SK6) : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Rata-rata indeks profesionalitas ASN, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 81;

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan/Manajemen SDM
- b) Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM
- c) Gaji dan Tunjangan

2. Sasaran kegiatan ketujuh (SK7) : Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Nilai minimal indeks layanan publik, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,70.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

a) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Setiap tahunnya terus dilakukan perbaikan dan penambahan sarana sesuai kebutuhan melalui pengadaan peralatan dan bangunan.

3. Sasaran kegiatan kedelapan (SK8) : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

- Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 78,5;
- Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 91,0.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran

Dalam mewujudkan kinerja balai yang baik, perlu juga dilakukan perencanaan yang baik. Sehingga program yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan anggaran dapat direncanakan se-efektif mungkin.

b) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Secara berkala BSPJI Banjarbaru melaksanakan pemantauan berupa monev bulanan untuk melakukan evaluasi dari realisasi atas perencanaan yang telah dibuat, dan setiap akhir tahun akan dilakukan monev tahunan dan juga Rapat Tinjauan Manajemen

c) Penyelenggaraan Kearsipan

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam mewujudkan pelaksanaan Standardisasi serta peningkatan Jasa Pelayanan Teknis BSPJI Banjarbaru. Hal ini merupakan cerminan dari penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklatur yang telah mendapat persetujuan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah **melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.**

Sebagai bagian yang tak terpisahkan bahwa BSPJI Banjarbaru merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian maka program yang dituangkan dalam rencana kinerja ini mengacu pada program Kementerian Perindustrian dan tidak menutup kemungkinan dalam program tahunan terjadi fokus baru sesuai dengan tuntutan atau permasalahan pada tahun berjalan, namun program utama tetap diarahkan untuk mencapai tujuan BSPJI Banjarbaru.

Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja BSPJI Banjarbaru Tahun 2023 ini, maka diharapkan program akan lebih terarah dengan hasil yang dapat diukur sehingga secara bertahap dapat mengisi dan memenuhi Rencana Strategis yang telah disepakati.

RENCANA KINERJA

**Unit Pelaksana Teknis : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Banjarbaru**
Tahun : 2023

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	35	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	45	Persen
		2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	7	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	0,75	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	85,0	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	95	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,60	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	81	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,70	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	78,5	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91,0	Nilai

Banjarbaru, November 2023
Kepala BSPJI Banjarbaru


Marzuki Marnala Sinambela